



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jl Raya Kandang Limun Bengkulu No.Telp: (0736) 21170 Psw:201

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlita Eryke, S.H.M.H
Nip : 198102212005012002
Jabatan : Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah Kutei

Menerangkan bahwa :

Nama : Dr.Tito Sofyan, S.H.M.S
Nip : 19600604198603004
Jabatan : Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Benar yang bersangkutan telah membuat Tulisan/Karya Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah Kutei untuk Edisi 26, April 2014 dengan judul : "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Di Pasar Modal Melalui Pengembangan Good Corporate Governance", dan tulisan tersebut dalam proses penerbitan (Tulisan Terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 02 April 2014
Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah Kutei

Herlita Eryke, S.H.M.H
Nip: 198102212005012002

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM DI PASAR MODAL MELALUI PENGEMBANGAN CORPORATE GOVERNANCE

Oleh :
Tito Sofyan

SUMMARY

The purpose of this research is to discuss the problem investor to get a legal protection, and to discuss the problem investor in security market. The research is based on Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Furthermore, this research also to analyze the law conception problem that can be developed protection for the rights of investors in security market in the contribute to the development of law in Indonesia.

The concept that can be developed to increase the protection is to make UUPM give stronger legal framework in the future regulation of the protection of investor's right and maximize information disclosure company and for company that have not good as the guarantee of certainty of law that is made by investor. Corporate Governance refer to the discipline of EOP UUPM norm.

A. PENDAHULUAN

Hingga saat ini, sistem tata kelola perusahaan yang *Corporate Governance* merupakan hal yang sangat penting dan masih fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. *Organisasi* di bidang *corporate governance* banyak terbentuk, pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Kebijakan *Corporate Governance* (KKG). Pada tahun 2004 Komite ini berubah menjadi Komite Nasional *Corporate Governance* lingkup tugasnya lebih luas tidak hanya menaungi kebijakan korporasi tetapi juga di sektor pemodal.

¹Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., Staf Pengajar Universitas Fask Fakultas Hukum Bengkulu

²Tim Studi, Studi Penerapan *Corporate Governance* Dalam Peraturan Bapepam Menkeu *Corporate Governance* Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2006

Komite ini memiliki fungsi untuk mempromosikan praktik pengelolaan yang baik sekaligus memantau perbaikan tata kelola perusahaan. Bapepam sebagai regulator di Pasar Modal juga memiliki tugas untuk memprakarsai dan memantau pengembangan tata kelola perusahaan karena itu sehingga Bapepam juga turut aktif dalam keanggotaan Komite.

Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang baik Komite mengacu pada prinsip yang didefinisikan oleh *OECD for Economic Development* yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengembangan tata kelola untuk pemerintahan maupun dunia usaha. Definisi yang dikeluarkan prinsip *Corporate Governance* pada Mei 1999 dan telah direvisi pada bulan 2004. Prinsip *Corporate Governance* dikelompokkan pada tahun 2004 mencakup:

- Memastikan kerangka pemerintahan yang efektif;
- Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saham;
- Perlakuan yang sama terhadap Saham;
- Peran *Shareholder* dalam *Corporate Governance*;
- Keterbukaan dan Transparansi;
- Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi).

Penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya diadopsi oleh dunia usaha secara umum tetapi juga sektor industri sebagai pengembangan industri Pasar Modal. Sebagai regulator Pasar Modal memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menerbitkan peraturan. Namun demikian praktik internasional *Corporate Governance* terus berkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang terutama UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengembangan tata kelola teoritis maupun prakteknya khususnya di Pasar Modal. Pengkajian untuk melihat sejauh mana ketentuan dan peraturan di Bidang Pasar Modal dapat secara berkelanjutan mempromosikan praktik pengelolaan yang baik.

³ Ibidhal. 92.

⁴ Bapepam, Annual Report 2011.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Sejauh manakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan dalam kegiatan pasar modal oleh otoritas pasar modal?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang disebut bahan hukum sekunder atau literatur. Bahan hukum bersifat normatif digunakan terutama untuk mengkaji peran hukum yang terkait dengan substansi hukum positifnya serta hanya terhadap norma, tetapi juga asas-asas dan nilai yang terkandung di dalamnya).

A. PEMBAHASAN

1. Definisi *Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 2000); misalnya hukum, psikologi, ekonomi, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu lain, agama. Seringkali kita melihat beberapa pakar *Corporate Governance* secara eksplisit berbeda. Adapun beberapa definisi yang dapat dihipunkan dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

a. Sir Adrian Cadbury (*Global Corporate Governance Model*, 2000) menjelaskan *Corporate Governance* sebagai berikut:

"*Corporate Governance is concerned with holding between economic and social goals and between individual goals. The Corporate Governance framework is there to encourage efficient use of resources and equally to require accountability and stewardship of those resources. The aim is to align as near as possible the interests of individuals, corporations and society.*"⁵ Pernyataan ini menekankan bahwa *Corporate Governance* merupakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan samping itu juga menekankan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya yang memperhatikan kepentingan, baik individu perusahaan, dan masyarakat.

⁵Cadbury, Sir Adrian, *Corporate Governance Model*, 2000.

b. Shann Turnbull (2000) *Corporate Governance* sebagai berikut:

Corporate Governance describes all the the influence of institutional processes including the controllers and regulators, involved in organizing the production and services. Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses organisasi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga menekankan *control dan regulator* merupakan juga substansi penting dalam membangun *Good Corporate Governance*.

c. Achmad Syakhroza (2002) *Good Corporate Governance* secara lebih gamblang, mudah dan jelas dimana ia mengatakan

... Corporate Governance adalah suatu sistem yang dipakai untuk mengarahkan dan mengendalikan (*directing, controlling, and supervising*) sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Prinsip-prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fair* dalam rangka mencapai tujuan dalam makalahnya, Syakhroza mengatakan secara tegas bahwa *Good Corporate Governance* terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu:

- 1) Fokus ke *Board*.
- 2) Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan.
- 3) Pengelolaan sumber daya organisasi yang Efisien, Efektif, Ekonomis dan Produktif (E3P).
- 4) *Transparan, Accountable, Responsible, Independent, (TARIF)*.
- 5) Tujuan organisasi.
- 6) *Strategic Control*

d. Definisi *Corporate Governance* dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No 7/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang praktik GCG pada BUMN adalah:

... Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, memperakuntabilitas, mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, memperhatikan kepentingan stakeholdernya, berlandaskan peraturan perundang dan etika

⁶ Turnbull, Shann *Corporate Governance: Changes and Paradigms* *Revolution*, 2000, vol. 1, No. 1, pp. 3.1

⁷ Achmad Syakhroza, *Best Practice Corporate Governance* Komite Lokal Perbankan Indonesia No. 06 Th. XXXII Juni 2003.

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dan akuntabilitas yang berdasarkan perundang-undangan dan nilai etika serta memperhatikan tujuan jangka panjangnya ada untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

e. *Organization of Economic Development (OECD)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

... Corporate Governance is the system by which corporations are directed and controlled. Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among participants in the corporation, such as the board, management and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the framework through which the company objectives are set, and the means of monitoring performance

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sehingga, maka struktur *Corporate Governance* menjelaskan distribusi dan tanggungjawab dan masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan, yaitu antara lain Dewan Direksi, Manajemen, Pemegang saham, dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan bagaimana aturan dan proses pengambilan dan keputusan kebijakan serta bagaimana melaksanakannya, maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dijawabkan dan dilakukan dengan baik.

2. Prinsip-prinsip OECD 2004 Mengenai *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *Corporate Governance* menjadi acuan masyarakat internasional dalam *Corporate Governance* namun OECD menjelaskan tidak satu model *Corporate Governance* yang cocok untuk semua negara, mengingat masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara menggunakan sistem dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh dewan pengawas perusahaan.

⁸Tim Studi, cit.

disebut *Key Executive*. Sementara itu banyak juga negara yang menerapkan *two tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh *Commision* dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh karena itu, penerjemahan yang dilakukan dalam penelitian ini sistem dimana Indonesia menggunakan *stehing* sebagai dalam *EC* diartikan sebagai Dewan Komisaris, *Executive* sebagai Direksi.

Secara umum terdapat enam prinsip dalam *Prin* sip *EC 2004* mengenai *governance*. Prinsip ini menjelaskan hal yang mencakup, kerangka *governance* pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab *Prin* sip prinsip tersebut sebagai berikut :

Prinsip Menjamin Kerangka Corporate Governance Efektif

Prinsip *EC* ini menekankan pada untuk memastikan bahwa dasar atau basis bagi pengembangan *governance* efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa *governance* dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan fungsi dan tanggung jawab yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam rangka memastikan terciptanya *governance* yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. Selain itu, kelembagaan yang ada juga harus dapat berkontribusi dalam menjalankan kegiatannya. Kerangka *governance* harus mengandung unsur perundangan, peraturan pelaksana, peraturan yang disusun berdasarkan *best practice* komitmen antar pihak yang terkait, dan praktik bisnis yang lazim di suatu negara. Selanjutnya, unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan negara terkait dengan sejarah dan budaya negara tersebut. Kerangka *Corporate Governance* tentu juga akan memerlukan penyesuaian berdasarkan keadaan dan latar belakang negara yang bersangkutan.

Prinsip Hak Pemegang Saham dalam RUPS dan Kepemilikan Saham

Prinsip *Corporate Governance* pada dasarnya mengatur mengenai hak pemegang saham dalam kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat pemodal saham terutama perusahaan publik, memiliki risiko seperti saham tersebut dapat dijual ataupun dibeli oleh pemegang saham tersebut untuk mengubah porsinya. Selain itu kepemilikan saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. Prinsip ini dapat diartikan sebagai Prinsip Hak Pemegang Saham (RUPS).

Secara rinci prinsip hak pemegang saham sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

- a. Hak dasar pemegang saham diperoleh cara pendaftaran yang aman atas kepemilikan saham atau secara lain memperoleh informasi yang relevan atau material tentang perusahaan sesuai waktu, partisipasi dan memberikan hak suara dalam RUPS, pemegang saham memilih dan mengganti anggota pengurus perusahaan memperoleh hak atas keuntungan perusahaan.
- b. Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi yang cukup tentang perusahaan dan perubahan penting perusahaan.
- c. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus dapat menentukan tata caranya, termasuk tatacara pemungutan suara, aturan penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham harus dapat hak suara secara langsung atau tidak langsung harus dianggap memiliki kekuatan yang sama, baik dilakukan dengan kehadiran pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pemodal tertentu untuk memperoleh pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan.
- e. Pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan secara efisien dan transparan dengan prosedur tertentu.

pengambilalihan kendali perusahaan di Pasar Modal, dan transaksi biasa, seperti merger dan penjualan asset perusahaan dan substansial, harus diatur secara jelas dan diungkapkan sehingga mengetahui hak dan pilihannya. Transaksi harus dilakukan pada harga yang transparan dan wajar yang melindungi hak seluruh pemegang saham sesuai dengan klasifikasi kelasnya. Kebijakan tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan pengurus kewajiban melakukan pertanggungjawaban.

- f. Pelaksanaan hak atas kepemilikan seluruh pemegang saham, termasuk masuk pemodal kelembagaan, harus difasilitasi.

Prinsip Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsip ditegaskan kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan saham asing. Prinsip ini penting karena kepercayaan pemodal di Pasar Modal. Untuk itu industri Pasar Modal harus dapat melindungi tindakan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajemen atau direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Pada praktik pemegang saham utama perusahaan mempunyai kekuatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang menguntungkan hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk direksi dan komisaris.

Dari kemungkinan terjadinya hal yang dapat merugikan kepentingan pemodal, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini untuk melindungi pemodal, perlu suatu informasi yang jelas kepada pemegang saham. Seperti hak untuk memesan saham terlebih dahulu pemegang saham utama untuk suatu kepentingan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran hak pemegang saham tersebut.

Prinsip ini terbagi atas 3 sub prinsip utama, yaitu :

- a. Pertama adalah mengenai kesamaan perlakuan antara pemodal dalam kelas saham yang sama.

- b. Bagian kedua prinsip 3 ini berbicara mengenai larangan transaksi (*insider trading*) perdagangan tutup sendiri yang merugikan (*abusive self-dealing*) dan tidak boleh. OGC sudah mempunyai peraturan perundang-undangan berkenaan dengan larangan dua transaksi masih menjadi masalah adalah penegakkan hukum yang berpelanggaran ketentuan yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan perintahnya terdapat penegakan hukum khususnya untuk aksi di atas.
- c. Bagian terakhir dari prinsip 3 adalah kewajiban dari komisi manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya komisaris jika baik langsung maupun tidak langsung jika pihak ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. Pengungkapan ke pihak di atas kepada dewan komisaris juga harus diikuti dengan sertakan pihak di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan transaksi yang memuat kepentingan mereka tersebut.

Prinsip Peran Stakeholder dalam Corporate Governance

Prinsip OGC (keempat) membahas mengenai *Stakeholder* dalam *Corporate Governance* (CG) yang prinsip ini menyatakan bahwa

&.. Kerangka *Corporate Governance* mengakui hak *stakeholders* yang dicakup oleh perjanjian atau perjanjian (*mutual agreements*) mendukung secara aktif kerjasama perusahaan *stakeholders* dalam menciptakan kesejahteraan, pelestarian dan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable*) kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan

Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: kepentingan *stakeholders* seperti pemodal, karyawan, kreditur dan memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumberdaya *stakeholders* tersebut harus dialokasikan secara-efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensinya perusahaan. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan *stakeholders* dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan ke *Corporate Governance* pengelolaan perusahaan yang dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan

pemangku kepentingan baik melandaskan umudapgn pernjanjian.

Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Pada prinsip ini ditegaskan bahwa ke *Corporate Governance* memastikan bahwa keterbukaan informasi yang dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan an, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepekelola perusahaan.

Dalam rangka dengan kepada pemegang saham, perusahaan kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi-atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun s. Pengalaman di *bagarak* yang mempunyai Pasar *Modal* yang menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan pemoda kuat di Pasar Modal dengan sendirinya akan menarik pemoda kan modalnya.

Namun demikian *syarpan* mengenai pengungkapan keterb yang diminta *regulator* diharapkan tidak akan *menyebabkan* beban perusahaan, atau membahayakan kepentingan per dengan posisi dalam persaingan. Untuk menendur *keabsahan* yang harus *disiplin* konsep materialitas perlu diterapkan. Informasi dapat didefinisikan sebagai informasi yang *apabila* tidak dis tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis informasi. Dalam *memelihara* hubungan dengan pemodal da pasar, perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip per (*equitable treatment*) informasi yang diperoleh setiap pemegang

Prinsip Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direks

Prinsip GCG *terakhir* berkaitan dengan tang gungjawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam kan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mer strategis perusahaan, *merifektif* yang manajemen oleh dev serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang

Berkaitan dengan adanya dua macam struktur-pengawasan perusahaan di antara *one tier board* dan *unitary board*, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada pemisahan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas atau dan dewan direksi sebagai pengurusan perusahaan, maupun pada perusahaan yang mempunyai satu dewan pengurus perusahaan dalam satu dewan.

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah nitor kinerja manajerial dan pencapaian kinerja (bagi pemegang saham). Di lain pihak, dewan harus menghindari benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan.

Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif. Selain itu, tanggung jawab yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, dan perburuhannya. Dewan perlu memiliki akuntabilitas dan dapat dipercaya oleh pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok, dan masyarakat.

3. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal (UUPM) mengatur kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penjualan Efek (IPO) atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya keuangan, manajemen, produksi, dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

⁹Tito Sofyan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Penjualan Saham di Pasar Modal, Disertasi Doktor Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013 hal. 383.

investasi. Oleh karena itu UUPM mengatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memenuhinya di pasar sekunder untuk menghormati Prinsip Keterbukaan. Kegagalan kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan penawaran umum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemegang sahamnya (raja) dan dapat dituntut pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam UUPM diatur pula kewajiban yang melingkupi Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi, Konsultan Hukum, Penilai, dan profesi lainnya, untuk memenuhi kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan sanksi berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas ketidakpatuhan kewajiban yang ada dalam UUPM tersebut.

Di dalam UUPM juga diatur tentang adanya sistem perdagangan pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dapat memfasilitasi masing-masing dan perdagangan dapat dilakukan secara efisien. Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan secara teratur dan wajar, dan efisien serta masyarakat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsipnya ada dalam UUPM, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penindakan dan pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Pidana.

Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM di dalam mengatur pasar secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Pendekatan Kelembagaan di UUPM terasa sangat kuat, contoh: Bapepam adalah lembaga pengawas Pasar Modal, Bursa Efek sebagai lembaga penyelenggara perdagangan, Lembaga Kliring dan penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi bursa dan lembaga lainnya seperti Lembaga penunjang pasar modal dan profesi penunjang pasar Modal. Sementara Pendekatan Aktivitas

pas-pasal di dalam UUPM ini yang memuat aktifitas dari s
sebagaimana tersedia¹⁰.

Disamping kedua pendekatan diatas, sistematika penyusunan undang tentang pasar Modal ini tidak melepaskan-diri dari p aspek fundamental yang biasa dianut dalam pembangunan suatu yaitu bahwa undang tersebut setidaknya memuat ketentuan ketentuan pokok berupa landasan filosofis, yuridis, sosiolog nuhan unsur filosofis tertuang dalam Konsiderans- Menimbang kan, bahwa Pasar Modal mempunyai per-dalamnya p-strategis bangunan nasional untuk terciptanya suatu masyarakat ac berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Dari segi yuri ini secara eksklusif hanya mepgkat urang aspek ke lembaga dan ar g i b e r k a y a dengan Pasar Modal, akan semua ket-eu antuan yang tertuang di dalamnya selalu di dengan ketentuan p e n d a n g a n g lainnya.

Sementara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat da pihak yang diap-pas-pasal dari UUPM ini yang mencakup seluruh pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan aktifitas ke-pas-a-lan dan perusahaan publik. Kemudian, apabi dengan kondisi sekarang dimana Indonesia (bah kedang me masuki era globalisasi, maka keberadaan UUPM ini mempunya cukup strategis, yaitu menciptakan landasan yang kokoh aga lebih siap dan mantap untuk menciptakan suatu pasar Moda kompetitif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasid dicapai.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan Pemegang saham (an) merupakan salah satu unsur dal

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah RUU 1995 tentang Pasar Modal

Modal yang sangat penting, tanpa adanya jumlah & fungsi pasar modal tidak akan berkembang dan d. Pemodal juga merupakan ~~stakeholders~~ *stakeholders* lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, pegawai bersama dengan emiten, pemodal merupakan modal bagi perusahaan emiten. Mengingat penting modal, maka ~~termasuk~~ *termasuk* pihak yang perlu mendapat hukum yang adil dan seimbang dengan emiten kedudukan pemodal seringkali beradanya ~~tidak~~ *tidak* proporsional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berlaku saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban dalam Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan masyarakat. Namun demikian, karena UUPM telah disesuaikan dengan perkembangan *governance* berdasarkan OEC 2004 dikembangkan, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan UUPM agar dapat dijadikan *legal frame* yang lebih kuat dalam mengatur hukum terhadap hak pemodal dan transparansi informasi bagi perusahaan yang akan melakukan *public offering* jaminan adanya kepastian hukum yang modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini telah mengatur masalah yang sangat penting dalam Pasar Modal, yaitu kewajiban dalam suatu Penawaran Umum memenuhi Prinsip Keterbukaan, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, arpan dan Agnesic bersama DPR sebagai pembuat undangsegera perubahan dan Undang Nomor 8 Tahun 1995 ten untuk disesuaikan prinsip *incorporate governance*

OECD 2004, karena yang diundangkan pada tahun :
 sebelum prinsip *corporate governance* berdasarkan OECD 2004
 dikembangkan di dunia usaha. Oleh karena itu, adanya d
 perubahan terhadap ketentuan UUPMUR yang dipe
 dijadikan *legal frame* yang lebih kuat dalam mengat
 hukum terhadap hak pemodal dan transparansi infor
 bagi perusahaan yang akan masuk ke pasar modal
 jaminan adanya kepastian hukum yang modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syakhriana, *Practice Corporate Governance*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.
- Bapepam, Annual Report 2011.
- Bapepam, *Cetak Biru Pasar Modal*, Bapepam, Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2000.
- Cadbury, Sir Andrew, *Corporate Governance*, The Financial Times, 2000.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah RUU No. 10 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Fuad Rahmany, Ketua Bapepam, Jakarta, Rabu (12/8/2009), <http://economy.okezone.com/read/2009/08/12/278/247492>, diakses 26 Februari 2009.
- Tim Studi, Studi Penerapan OJK 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai *Corporate Governance*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan, 2006.
- Tito Sofyan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Pasar Saham di Pasar Modal*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2000.
- Tunbull, Shari, *Corporate Governance: Theories and Practices*, *Governance International*, 2000, vol. 1, No. 1, pp. 1-11.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pasar Modal;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;